

ABSTRAK

Nama : David Francis Jaury
Jurusan/Program Studi : Hukum/Magister Kenotariatan
Pembimbing : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Materi pokok penelitian Karakteristik Fiat Pengadilan Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Akibat Debitur Wanprestasi, dengan permasalahan apa karakteristik fiat pengadilan terhadap sertipikat hak tanggungan akibat debitur wanprestasi dan Apa ratio decidendi putusan Mahkamah Agung No. 2318 K/Pdt/2012 sehingga menolak Parate Eksekusi. Pendekatan konsep dan pendekatan kasus, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Karakteristik fiat pengadilan terhadap sertipikat hak tanggungan akibat debitur wanprestasi, bahwa fiat eksekusi didasarkan atas perintah Ketua pengadilan negeri atau dengan gugat perdata pemenuhan prestasi sesuai dengan ketentuan pasal 224 HIR. Pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila debitur atau tergugat menolak untuk dieksekusi, maka eksekusi hanya dapat dilakukan setelah diberikannya surat peringatan atau *aanmaning* agar tergugat melakukan pengosongan obyek sengketa dan dilanjutkan dengan lelang. Hal ini berbeda dengan eksekusi melalui parate, karena cukup dilakukan dengan kekuasaan sendiri oleh kreditur ketika debitur wanprestasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 6 jo pasal 14 dan pasal 20 UUHT, yang harus dilakukan secara lelang, kecuali kedua belah pihak mengadakan perjanjian atau kesepakatan tersendiri. Ratio decidendi putusan Mahkamah Agung No. 2318 K/Pdt/2012 sehingga menolak Parate Eksekusi, bahwa hakim menolak adanya parate eksekusi yang diajukan, karena hakim menganggap tidak adanya suatu kesepakatan atau restrukturisasi kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak dianggap tidak pernah ada atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak mencerminkan suatu kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan tidak memberikan perlindungan kepada debitur atas dilelangnya benda yang dibebani sebagai agunan. PT Bank BRI (Persero) yang mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak menurut ketentuan pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata adalah dilarang.

Kata Kunci: Fiat Pengadilan, Hak Tanggungan, Wanprestasi

ABSTRACT

Name : David Francis Jaury
Dicipline/Study Programe : Law/Magister of Notarial
Contributor : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S

The subject matter of the research is Fiat Court Characteristics to the Certificate of Debt Rights due to the Default Debtor, with the problem what is the characteristic of the court court to the certificate of mortgage due to the debtor of the default and What is the Decidend Ratio of the Supreme Court Decision. 2318 K / Pdt / 2012 thereby rejecting the Parate Execution. Conceptual approach and case approach, the following conclusions are obtained: The characteristics of court fiat against the certificate of mortgage due to the default debtor, that the fiat of execution is based on the order of the Chairman of the district court or by the civil suit of achievement fulfillment in accordance with the provisions of article 224 HIR. The execution of a court decision with a permanent legal force, if the debtor or defendant refuses to be executed, the execution can only be made after the warning or aanmaning letter is given to the defendant to empty the object of the dispute and proceed with the auction. This is in contrast to execution by parate, as it is only done by the creditor's own powers when the defaulting debutant as referred to in Article 6 jo article 14 and article 20 UUHT, shall be conducted by auction, unless both parties have their own agreement or agreement. Ratio decidendi Supreme Court decision No. 2318 K / Pdt / 2012 thereby rejecting the Execution Parate, that the judge rejected the existence of the pared-up execution, because the judge considered the absence of an agreement or credit restructuring agreed upon by both parties was deemed to have never existed or had no legal force. The Decision of the Supreme Court does not reflect a legal certainty, legal justice, legal benefit, and does not provide protection to the debtor on the auction of objects that are burdened as collateral. PT Bank BRI (Persero) which terminates the credit agreement in accordance with the provisions of article 1338 paragraph (2) of the Civil Code is prohibited.

Keywords: Fiat Court, Deposit Rights, Default